

BAB I

PENDAHULUAN

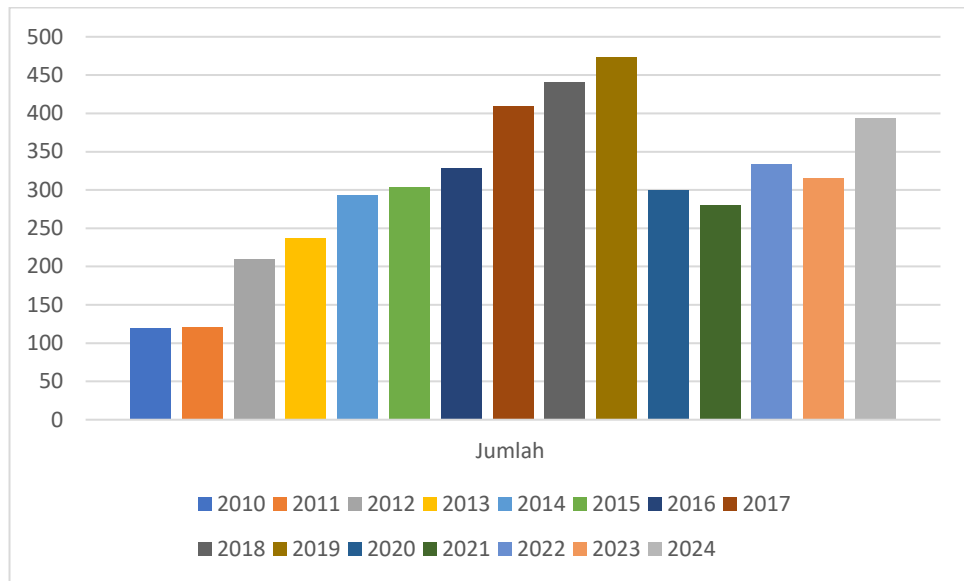
1.1 Latar Belakang Masalah

Kekerasan terhadap Perempuan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terus berulang dan masih banyak ditemukan di berbagai negara. Fenomena ini tidak hanya merugikan korban secara fisik maupun psikologis, tetapi juga memperkuat ketimpangan relasi gender dan menghambat upaya membangun Masyarakat yang setara serta inklusif. Karena hal tersebut, isu kekerasan terhadap Perempuan tidak dapat dipandang sebagai persoalan privat semata, melainkan persoalan publik yang menuntut tanggung jawab negara dan perhatian komunitas internasional. Sebagai respons terhadap urgensi tersebut, Dewan Eropa (*Council of Europe*) pada tahun 2011 mengadopsi *Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence*, yang lebih dikenal sebagai Konvensi Istanbul. Konvensi Istanbul mengategorikan kekerasan berbasis gender menjadi 4 bentuk yaitu kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi. Bentuk kekerasan berbasis gender yang sering terjadi adalah kekerasan oleh pasangan (*intimate partner violence*), pelecehan dan kekerasan seksual, mutilasi alat kelamin perempuan, hingga pembunuhan demi kehormatan (*honor killing*) (Jurviste & Shreeves, 2018).

Konvensi ini kerap dipahami sebagai salah satu instrumen hukum paling penting dalam kerangka perlindungan perempuan di Kawasan Eropa karena bersifat mengikat dan dirancang dengan pendekatan yang menyeluruh. Kerangka kerjanya

dibangun melalui empat pilar utama, yaitu pencegahan, perlindungan korban, pengakuan hukum terhadap pelaku, serta penyusunan kebijakan yang mengkriminalisasi berbagai kekerasan, mulai dari kekerasan fisik dan psikologis, penguntitan (*stalking*), pemaksaan perkawinan, hingga praktik mutilasi alat kelamin Perempuan. Dengan demikian, Konvensi Istanbul menempatkan negara sebagai aktor utama yang memikul tanggung jawab untuk memastikan keselamatan dan hak-hak warganya khususnya Perempuan (Council of Europe, 2026).

Turki memiliki posisi penting dalam sejarah pembentukan Konvensi Istanbul, Konvensi ini dibuka untuk penandatanganan di Istanbul pada Mei 2011, sehingga Turki tidak hanya berperan sebagai tuan rumah, tetapi juga tampil sebagai salah satu negara yang menunjukkan dukungan paling awal. Di bawah pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), Turki menjadi Negara pertama yang menandatangani sekaligus meratifikasi konvensi tersebut pada 12 Maret 2012. Ratifikasi ini disetujui secara bulat oleh parlemen (*Grand National Assembly*) tanpa adanya suara yang menolak, yang pada saat itu memperlihatkan adanya konsensus politik kuat untuk mendukung agenda perlindungan Perempuan dari kekerasan (Istanbul Barosu, 2011). Keterlibatan aktif Turki pada fase awal tersebut sering dipahami sebagai bagian dari orientasi kebijakan luar negeri dan politik domestik Turki yang ingin menampilkan diri sebagai negara yang modern, reformis dan selaras dengan standart demokrasi barat. Komitmen itu juga berkaitan dengan upaya Turki untuk mendekatkan diri pada norma-norma Uni Eropa serta memperkuat citra internasionalnya sebagai negara yang mampu memimpin inisiatif hak asasi manusia di Kawasan (M. Ün & Arıkan, 2022).



Gambar 1.1 Tingkat Pembunuhan Terhadap Perempuan di Turki Tahun 2010-2024

Sumber: *Wee Will Stop Femicides annual report, 2010-2024*

Dalam kurun waktu 2012 hingga 2020, Konvensi Istanbul kemudian menjadi rujukan normatif bagi pembentukan kebijakan dan regulasi tingkat nasional. Salah satu contohnya adalah pengesahan Undang-Undang No. 6284 tentang perlindungan keluarga dan pencegahan kekerasan terhadap Perempuan, yang banyak dinilai sebagai salah satu kerangka hukum paling progresif dalam Sejarah Republik Turki dalam isu kekerasan terhadap Perempuan (Şeker & Sönmezocak, 2021). Namun, pada tahun 2021 Turki mengalami perubahan yang cukup tajam dalam kebijakan luar negerinya, dengan dikeluarkannya Dekrit presiden Recep Tayyip Erdogan No. 3718 pada 20 Maret 2021. Keputusan tersebut menetapkan bahwa Turki menarik diri dari konvensi Istanbul secara sepihak dikarenakan adanya kelompok yang mencoba untuk memasukkan kepentingan penormalisasian terhadap “homoseksualitas”. Yang mana hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial dan struktur keluarga tradisional Turki

(Directorate of Communications, 2021). Media pro-pemerintah seperti Daily Sabah mengafirmasi framing bahwa konvensi telah disalahgunakan untuk melegitimasi homoseksualitas dan tidak selaras dengan nilai sosial Turki (Sabah, 2021). Media konservatif seperti Yeni Akit secara intens memproduksi konten anti-LGBT, terutama ketika debat publik mengenai konvensi Istanbul. Langkah ini menjadikan Turki negara pertama yang memilih keluar dari Istanbul Convention yang sebelumnya mereka pelopori dan ratifikasi. Situasi ini memunculkan paradoks dalam kebijakan luar negeri Turki, negara yang menjadi simbol dari konvensi tersebut justru mengambil jarak dan menghentikan ketertarikannya. Perubahan sikap ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi kebijakan luar negeri Turki, dari yang sebelumnya lebih terbuka terhadap norma internasional menuju pendekatan yang lebih defensif, terutama ketika norma tersebut mulai diperdebatkan dalam arena politik domestik (Aksoy, 2021).

Terdapat penelitian sebelumnya yang berkaitan mengenai analisis perubahan kebijakan luar negeri Turki dengan studi kasus penarikan konvensi Istanbul. Artikel pertama berjudul "*Combating Violence Against Women in Turkey: Legislation and Instances of Implementation*" yang ditulis oleh Safa Koçoğlu tahun 2019. Artikel ini menjelaskan bagaimana Turki melalui amandemen undang-undang dasar seperti KUHP perdata, UU Ketenagakerjaan, dan KUHP yang mana menjunjung tinggi prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta mengakui nol toleransi terhadap kesetaraan perempuan. Selanjutnya, guna mencegah kekerasan terhadap perempuan Turki menandatangani Konvensi Istanbul dan mengadopsi UU tentang Perlindungan Keluarga dan Pencegahan Kekerasan

terhadap Perempuan yaitu UU No. 6284 sebagai bentuk kepatuhan serta kewajiban terhadap konvensi tersebut. Sebagai bentuk nyata melawan kekerasan terhadap perempuan, Turki membentuk Wisma Wanita yang bertujuan untuk menghilangkan trauma bagi perempuan korban kekerasan. Wisma Wanita juga memberikan dukungan profesional untuk mendampingi korban kekerasan serta memenuhi kebutuhan seperti tempat tinggal, kebutuhan psikologis, konseling, medis, pendidikan, dan lain sebagainya. Artikel ini menjelaskan bagaimana bentuk tindakan pemerintah Turki terkait kekerasan gender dengan melakukan amandemen terkait UU di negaranya (Koçoğlu, 2019).

Penelitian kedua, berjudul “AK Party Dalam Kebijakan Luar Negeri Turki Studi Kasus: Keputusan Keluarnya Turki dari Istanbul Convention Tahun 2021” yang ditulis oleh Andi Safitri Manggarani Baso. Penelitian ini menjelaskan keterlibatan AKP dalam perubahan kebijakan luar negeri Turki dengan penarikan diri Turki dari konvensi Istanbul. Penelitian ini menempatkan AKP sebagai aktor domestik utama yang memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan luar negeri Turki. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa AKP menjalankan tiga peran partai politik, yaitu AKP berperan sebagai agenda setter dengan membangun wacana bahwa konvensi tersebut bertentangan dengan nilai sosial dan norma keluarga di Turki. Selanjutnya, AKP berperan sebagai agenda follower melalui dukungan konsisten dari elite partai dalam struktur pemerintahan terhadap kebijakan tersebut. AKP juga bertindak sebagai agregator kepentingan masyarakat domestik dengan mengaitkan keputusan penarikan diri dari konvensi dengan aspirasi mayoritas masyarakat Turki yang berhaluan konservatif (Baso, 2023).

Penelitian ketiga, berjudul “Alasan di Balik Penarikan Diri Turki dari Konvensi Istanbul: Sebuah Tinjauan Populisme dan Gender” ditulis oleh Anastasia Eunike Prananjani. Penelitian ini menjelaskan alasan mengapa Turki menarik diri dari konvensi Istanbul melalui sudut pandang populisme dan gender. Penelitian ini berfokus pada faktor dinamika sosial dan politik domestik Turki yang memengaruhi negara tersebut dalam mengambil keputusan.

Dinamika sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah faktor budaya tradisional masyarakat Turki yang memengaruhi persepsi masyarakat Turki terhadap konsep gender. Adapun politik domestik yang dimaksud berfokus pada faktor peran dan kepentingan aktor pemerintah, partai politik, serta kelompok masyarakat konservatif dalam proses pengambilan keputusan yang ada (Prananjani, 2025).

Penelitian keempat, berjudul “Kebijakan Penarikan Diri Turki dari Konvensi Istanbul Pada Masa Pemerintahan Recep Tayyip Erdogan” ditulis oleh Raisha Violina tahun 2023. Penelitian ini menganalisis kebijakan penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul pada masa pemerintahan Recep Tayyip Erdogan sebagai bentuk perubahan kebijakan luar negeri yang dipengaruhi oleh dinamika domestik dan internasional. Penelitian ini menjelaskan bahwa perubahan kebijakan tersebut dipengaruhi oleh parameter domestik struktural seperti penguatan sistem presidensial dan dominasi otoritas presiden, tekanan kelompok konservatif dan gerakan anti-gender. Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor domestik, khususnya kepentingan politik dan ideologis pemerintahan Erdogan lebih dominan dibandingkan tekanan internasional dalam mendorong keputusan penarikan diri

tersebut, sehingga isu ini tidak hanya merefleksikan isu perlindungan perempuan, tetapi juga pergeseran orientasi politik luar negeri Turki (Violina, 2023).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah dari penelitian ini Adalah Bagaimana faktor domestik dan internasional mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Turki dalam keputusan penarikan diri dari Konvensi Istanbul tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan umum untuk memberikan kontribusi terhadap Studi Hubungan Internasional, khususnya pada konteks kesetaraan gender di ranah internasional dan implementasi kebijakan luar negeri feminis. Secara keseluruhan, penelitian ini juga dilakukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan gelar Sarjana (S1) Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan penelitian secara khusus adalah menganalisis bagaimana perubahan kebijakan luar negeri Turki setelah menarik diri dari Konvensi Istanbul tahun 2021. Penelitian ini akan berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Turki melihat dari perspektif Foreign Policy Change Joakim Eidenfalk.

1.4 Kerangka Pemikiran

Penulis membutuhkan alat analisis yang mampu menjawab pertanyaan pada rumusan masalah. Alat analisis ini berupa rangkaian teori yang dibangun untuk menjelaskan fenomena yang ada dan dituangkan pada kerangka pemikiran.

1.4.1 Foreign Policy Change

Menurut Eidenfalk, *Foreign Policy Change* merupakan perubahan kebijakan luar negeri yang terjadi dalam berbagai tingkatan untuk menghadapi isu-isu internasional. Perubahan kebijakan luar negeri suatu negara dipicu oleh dua faktor, yaitu faktor domestik dan faktor internasional. Faktor domestik mencakup birokrasi, opini publik, media, kelompok kepentingan, dan partai politik. Faktor-faktor tersebut menciptakan tekanan internal yang mempengaruhi preferensi dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Sementara itu, faktor internasional meliputi dinamika global, regional dan bilateral, serta peran aktor non-negara seperti organisasi internasional dan organisasi non-pemerintah (Eidenfalk, 2006).

1.4.2 Faktor-Faktor Perubahan Domestik

Sumber perubahan dibagi menjadi faktor domestik dan faktor internasional. Kedua faktor tersebut saling berkaitan dan saling memengaruhi. Dalam kerangka ini kebijakan luar negeri ditentukan tidak hanya dengan mempertimbangkan situasi internasional tetapi juga oleh dinamika politik domestik yang dihadapi pemerintah. Oleh karena itu, para pemimpin perlu mempertimbangkan dinamika domestik yang memiliki peran penting dalam memengaruhi dan menekan pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan luar negeri suatu negara. Faktor domestik dapat

diklasifikasikan ke dalam lima komponen utama yaitu Birokrasi, Opini Publik, Media, kelompok Kepentingan, dan Partai Politik (Eidenfalk, 2006).

1.4.2 Birokrasi

Birokrasi lebih dipandang sebagai sumber pendorong stabilitas daripada sebagai sumber perubahan. Birokrasi pada dasarnya menolak perubahan dan hanya akan bergerak apabila adanya dorongan secara kuat dan berkelanjutan. Mayoritas kalangan birokrat memilih mempertahankan status quo dan hanya berperan dalam perubahan kebijakan luar negeri dalam kondisi tertentu (Halperin, 1974:99 dalam Eidenfalk, 2006). Meskipun demikian, birokrasi tidak sepenuhnya tertutup pada perubahan. Herman dalam penelitiannya menunjukkan bahwa birokrasi memiliki peran penting dalam mengadvokasi dan memerankan peran penting dalam perubahan kebijakan luar negeri (Herman, 1990; Holsti, 1982 dalam Eidenfalk, 2006)

1.4.3 Opini Publik

Opini publik memiliki peran penting dalam perubahan kebijakan luar negeri karena pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat agar kebijakan yang dijalankan dapat diterima dan dipertahankan. Masyarakat akan menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan tertentu melalui aksi demonstrasi atau tekanan sosial lain sehingga mendorong pemerintah untuk meninjau ulang, bahkan mengubah kebijakan luar negeri yang sedang dijalankan. Selain itu, opini publik juga berperan dalam memperkuat posisi kelompok kepentingan dan aktor-aktor yang berusaha mempengaruhi arah kebijakan pemerintah. Dengan demikian, opini publik tidak hanya berfungsi sebagai alat pendukung kebijakan pemerintah tetapi

juga sebagai kekuatan yang secara aktif mendorong terjadinya perubahan kebijakan luar negeri (Eidenfalk, 2006).

1.4.4 Media

Media merupakan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Melalui media, informasi kebijakan luar negeri disampaikan, ditafsirkan, dan diperdebatkan di ruang publik sehingga membentuk cara publik memahami dan menilai kebijakan tersebut. Selain sebagai penyampai informasi, media juga bertindak sebagai pengawas dan penyelidik yang memberikan informasi kepada publik maupun pemerintah. Media juga menjadi forum bagi aktor negara dan non-negara untuk menyuarakan dukungan atau kritik terhadap kebijakan yang sedang berjalan, sehingga dapat memberikan tekanan tambahan terhadap pemerintah dalam mengambil keputusan, dan memengaruhi opini publik (Eidenfalk, 2006).

1.4.5 Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan didefinisikan sebagai suatu organisasi terstruktur yang secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Kelompok kepentingan cenderung memusatkan perhatian pada isu-isu spesifik yang akan menarik perhatian publik, sehingga pemerintah akan memberikan respons yang cepat dan lebih serius untuk menangani isu tersebut, karena mengabaikan tuntutan tersebut berpotensi mengurangi dukungan politik terhadap pemerintah (Eidenfalk, 2006).

1.4.6 Partai Politik

Partai politik dalam hal ini merupakan partai-partai yang berada di parlemen, khususnya partai yang dukungannya dibutuhkan pemerintah untuk menjalankan pemerintahan atau untuk mempertahankan dan mengubah kebijakan tertentu. Opini publik juga memberikan tekanan kepada anggota parlemen untuk menyuarakan tuntutan masyarakat kepada pemerintah. Karena pemerintah kerap bergantung pada dukungan partai politik dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri (Eidenfalk, 2006).

1.5 Analisis Faktor-Faktor Internasional

Faktor-faktor internasional menjadi unsur penting dalam memahami perubahan kebijakan luar negeri suatu negara, karena politik internasional tidak hanya melibatkan negara, tetapi juga lembaga internasional dan aktor-aktor non-negara yang saling berinteraksi di tingkat global, regional, maupun bilateral. Eidenfalk menjelaskan bahwa pendekatan realisme dan ketergantungan kompleks digunakan secara bersamaan untuk menjelaskan pengaruh faktor internasional terhadap pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Pendekatan realisme memandang politik internasional sebagai arena persaingan kekuasaan antarnegara, tidak adanya otoritas tertinggi di atas negara membuat sistem internasional bersifat anarkis sehingga kecurigaan dan perhitungan kekuatan menjadi hal yang dominan (Mearsheimer, 1995 dalam Eidenfalk, 2006). Sedangkan teori ketergantungan kompleks memandang politik internasional merupakan hubungan antarnegara yang saling ketergantungan dalam ekonomi, politik, dan sosial serta melibatkan aktor selain negara (Keohane & Nye, 2011 dalam Eidenfalk, 2006). Eidenfalk membagi

faktor-faktor internasional tersebut ke dalam empat sumber utama, yaitu faktor global, faktor regional, hubungan bilateral dan aktor non-negara (Eidenfalk, 2006).

1.5.1 Global

Faktor global merujuk pada perubahan-perubahan dalam sistem politik internasional yang berdampak luas dan dapat memengaruhi arah kebijakan luar negeri suatu negara. Peristiwa atau aktor global tidak selalu secara langsung memicu perubahan kebijakan luar negeri tetapi memengaruhi banyak negara untuk membentuk ulang prioritas kebijakan luar negeri mereka dalam berbagai aspek. Pengaruh suatu peristiwa, pergeseran keseimbangan sistem politik internasional, pergeseran norma internasional atau lembaga internasional, dapat mendorong pemerintah untuk menyesuaikan atau bahkan mengubah kebijakan luar negeri suatu negara. Oleh karena itu, faktor global dipandang sebagai salah satu sumber penting yang memengaruhi kebijakan luar negeri (Eidenfalk, 2006).

1.5.2 Regional

Faktor regional merujuk pada peristiwa atau aktor yang tidak hanya berdampak pada suatu negara, tetapi juga mempengaruhi stabilitas dan dinamika politik di kawasan. Selain peristiwa regional, aktor-aktor di tingkat kawasan juga memiliki pengaruh yang signifikan. Organisasi kawasan dapat mempengaruhi cara suatu negara menyusun dan menyesuaikan kebijakan luar negerinya. Di samping itu, norma dan nilai yang berkembang di suatu kawasan juga membentuk pola hubungan antarnegara di wilayah tersebut. Perbedaan kekuatan dan kemampuan aktor regional akan memberikan pengaruh pada politik regional dan menjadi

pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri (Eidenfalk, 2006).

1.5.3 Hubungan Bilateral

Hubungan bilateral tidak hanya terjadi antar negara, tetapi juga antara negara dengan aktor lain seperti lembaga internasional di tingkat global maupun regional yang memiliki kontak, kerja sama, atau tekanan yang terjadi secara langsung antara negara dengan satu aktor tertentu. Melalui hubungan bilateral, negara atau lembaga internasional dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri negara lain dengan cara menjalin aliansi, memperkuat atau membatasi kerja sama ekonomi dan perdagangan, maupun memberikan tekanan melalui ancaman militer atau ekonomi. Oleh karena itu, hubungan bilateral menjadi sumber penting dalam proses perubahan kebijakan luar negeri (Eidenfalk, 2006).

1.5.4 Aktor non-Negara

Dalam perkembangan politik internasional, pengaruh aktor non-negara atau aktor transnasional semakin diakui. Meskipun negara tetap dipandang sebagai aktor utama dalam sistem politik internasional, pengaruh aktor non-negara sering kali cukup kuat, terutama pada isu-isu tertentu yang menarik perhatian publik internasional. Pengambil keputusan mungkin harus mempertimbangkan pengaruh aktor non-negara ketika memutuskan kebijakan luar negeri (Eidenfalk, 2006).

1.6 Window of Opportunity

Window of Opportunity atau jendela peluang merupakan tahap penting dalam proses perubahan kebijakan luar negeri, dimana sumber-sumber perubahan

hanya dapat memengaruhi kebijakan apabila dipersilahkan sebagai peluang oleh pengambil keputusan kunci. Pada tahap ini menekankan pada persepsi pemimpin politik dalam mengambil keputusan untuk melihat adanya peluang yang muncul akibat tekanan atau pengaruh dari sumber perubahan. Peluang untuk bertindak tidak selalu terbuka dan dapat hilang karena isu dianggap sudah selesai, perhatian politik beralih ke isu lain, krisis mereda, dukungan politik menurun, terjadi pergantian aktor politik, atau tidak tersedianya alternatif kebijakan yang jelas yang artinya proses pembuatan kebijakan dapat dimulai dari sumber perubahan atau dari pengambil keputusan utama itu sendiri.

Persepsi tersebut dipengaruhi oleh karakteristik pribadi pemimpin, seperti kepercayaan, motif, gaya pengambilan keputusan, gaya interpersonal, minat dan pengalaman dalam urusan luar negeri. Perubahan kebijakan dapat terjadi melalui dua jalur: Pertama, ketika perubahan struktural menciptakan tekanan yang kemudian ditindaklanjuti oleh pengambil keputusan dan kedua, ketika pemimpin secara aktif mendorong agenda politiknya sendiri dan menciptakan jendela kesempatan untuk mewujudkan perubahan kebijakan luar negeri (Eidenfalk, 2006).

1.7 Sintesa Pemikiran



Gambar 1.2 Sintesa Pemikiran

1.7.1 Argumen Utama

Penarikan Turki dari Konvensi Istanbul pada Maret 2021 menunjukkan perubahan kebijakan luar negeri Turki yang bersifat reorientasi normatif. Keputusan Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk menarik diri melalui dekret presiden menunjukkan terjadinya perubahan signifikan dalam prioritas dan arah kebijakan luar negeri Turki. Menurut Eidenfalk, perubahan kebijakan luar negeri dapat dipengaruhi oleh dinamika politik domestik dan ideologis pemimpin. Penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul pada tahun 2021 mencerminkan konsolidasi kekuasaan presiden Recep Tayyip Erdogan yang semakin menguatkan agenda konservatif dan religius dalam politik domestik. pemerintah memanfaatkan narasi perlindungan nilai keluarga tradisional untuk merespons tekanan kelompok Islam konservatif dan nasionalis yang menilai konvensi tersebut bertentangan dengan norma sosial Turki. Dengan demikian, perubahan kebijakan luar negeri ini

merupakan instrumen politik domestik untuk memperkuat legitimasi rezim dan mempertahankan dukungan koalisi politiknya. Peran opini publik dan kelompok kepentingan dalam mempengaruhi arah kebijakan luar negeri.

Penarikan Turki dari konvensi Istanbul berlangsung di tengah meningkatnya polarisasi antara kelompok pro-hak perempuan dan organisasi konservatif Turki. Pemerintah mengakomodasi tekanan kelompok konservatif sebagai basis elektoral strategis, menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri dapat digunakan sebagai alat kompromi domestik untuk menjaga stabilitas politik. Media pro-pemerintah seperti Daily Sabah mengafirmasi framing bahwa konvensi telah disalahgunakan untuk melegitimasi homoseksualitas dan tidak selaras dengan nilai sosial Turki dan media konservatif seperti Yeni Akit secara intens memproduksi konten anti-LGBT, terutama ketika debat publik mengenai konvensi Istanbul. Media bukan hanya sekedar penyalur informasi, tetapi arena politik wacana yang memproduksi legitimasi. Eidenfalk juga mengatakan bahwa perubahan dalam struktur sistem internasional dapat membuka peluang bagi negara untuk menyesuaikan arah kebijakan luar negerinya.

Di tengah menguatnya populisme dan konservatisme global, Turki memandang adanya legitimasi implisit untuk menantang norma liberal internasional. Ketiadaan sanksi tegas dari aktor internasional atas penarikan dari Konvensi Istanbul menunjukkan bahwa biaya eksternal relatif rendah, sehingga lingkungan internasional yang lebih permisif terhadap tindakan unilateral memberi ruang bagi Turki mengambil keputusan yang sebelumnya berisiko secara diplomatik. Perubahan kebijakan umumnya terjadi saat muncul *window of*

opportunity, yaitu situasi yang memungkinkan pengambil keputusan bertindak dengan hambatan minimal. Pada 2021, pandemi COVID-19 mengalihkan fokus publik dan internasional, kondisi ini dimanfaatkan untuk menarik diri dari Konvensi Istanbul melalui Dekrit presiden tanpa proses legislatif yang panjang. Langkah tersebut memberikan keuntungan berupa penguatan dukungan kelompok konservatif dan nasionalis, peningkatan kendali politik domestik, serta penegasan kedaulatan kebijakan luar negeri dengan konsekuensi internasional yang relatif terbatas dalam jangka pendek.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian merupakan aspek penting yang harus ditentukan untuk memudahkan penulis dalam memperoleh dan mengolah data. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena berdasarkan fakta empiris yang ditemukan. penelitian deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk memberikan penjelasan, deskripsi, serta validasi terhadap fenomena yang diteliti secara sistematis dan berbasis data, bukan opini. Fenomena yang diangkat dalam penelitian deskriptif harus mengandung nilai ilmiah dan tidak bersifat terlalu luas, sehingga fokus penelitian dapat dipertahankan.

Dalam penelitian berjudul “*Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Turki Studi Kasus Penarikan Konvensi Istanbul Tahun 2021*”, tipe penelitian deskriptif digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Turki berdasarkan fakta yang disajikan melalui

laporan, publikasi resmi, serta temuan akademik. Penelitian deskriptif kualitatif ini berusaha menangkap dan memaknai fenomena implementasi kebijakan melalui interpretasi peneliti terhadap data yang didapatkan (Sugiyono, 2019).

1.8.2 Jangkauan Penelitian

Penelitian dengan judul “ Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Turki dalam Penarikan diri dari Konvensi Istanbul Tahun 2021 berfokus untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Turki pada penarikan dari Konvensi Istanbul. Periode 2011 hingga 2021 dipilih karena merupakan tahun awal penarikan diri Turki dari konvensi Istanbul.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari pihak yang menjadi objek penelitian, melainkan melalui perantara seperti dokumen, laporan, atau literatur. studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan memahami teori maupun temuan yang relevan dari berbagai sumber ilmiah (Cresswell, 2014).

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui studi pustaka yang mencakup jurnal akademik, laporan pemerintah Turki, analisis kebijakan, laporan lembaga internasional, serta riset terdahulu yang menganalisis terkait perubahan kebijakan luar negeri dan Konvensi Istanbul.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk menyusun data yang diperoleh secara sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan yang kredibel. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan menafsirkan fenomena dalam konteks alami dengan peneliti sebagai instrumen utama. Penelitian kualitatif menekankan makna dibandingkan generalisasi. Melalui penelitian ini, penulis bertujuan untuk melakukan eksplorasi yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor pendukung terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Turki.

1.8.5 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan, mencakup pemaparan latar belakang masalah, rumusan masalah, argumen utama, dan metodologi penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, jangkauan penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II : pada bab II akan membahas Faktor Domestik Kebijakan luar negeri Turki dalam penarikan diri dari Konvensi Istanbul tahun 2021 meliputi Birokrasi, Opini Publik, Media, Kelompok kepentingan, Partai Politik

BAB III: pada bab III akan membahas Faktor Internasional Kebijakan luar negeri Turki dalam penarikan diri dari Konvensi Istanbul tahun 2021 meliputi Global, Regional, Hubungan Bilateral, Aktor Non-negara

BAB IV : pada bab IV akan membahas Kesimpulan dan Saran dalam Kebijakan luar negeri Turki dalam penarikan diri dari Konvensi Istanbul tahun 2021